

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Amsyari dalam Hardjasoemantri (2005), menyebutkan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup manusia akan mempengaruhi eksistensinya, hal tersebut disebabkan manusia yang sangat tergantung pada lingkungannya. Karena manusia, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat merupakan bagian dari lingkungannya, maka manusia juga adalah pengelola lingkungan tersebut.

Lingkungan hidup telah menjadi isu utama pada hampir setiap negara di dunia. Beberapa pertemuan yang membahas pentingnya pengelolaan lingkungan dapat dilacak sejak tahun 1972 yang menghasilkan Deklarasi Stockholm (Soemarwoto,1991). Kemudian tahun 1987 *World Commission on Environment and Development* (WCED) dalam laporannya berjudul *Our Common Future*, mempopulerkan istilah Pembangunan Berkelanjutan (Soerjani,2000). Yang paling komprehensif menghasilkan kebijakan pengelolaan lingkungan yaitu pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 atau lebih dikenal *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) dengan Agenda 21-nya (Hardjasoemantri,2005).

Dalam Agenda 21 yang merupakan rencana kerja global pertama yang disusun secara menyeluruh mengenai pembangunan berkelanjutan, konsep-konsep kemitraan, keterpaduan, partisipasi, peran serta, pemberdayaan dan sebagainya semakin jelas kedudukannya dalam pengelolaan lingkungan (Hardjasoemantri,2005). Salah satu upaya yang dapat dilakukan guna memenuhi harapan sebagaimana konsep di atas adalah memberikan pendidikan, penyadaran kepada masyarakat tentang lingkungan. Pendek kata semua pihak (*stakeholders*) dalam hal ini

pemerintah, masyarakat, maupun swasta sudah selayaknyalah mengambil peran secara proporsional dalam pengelolaan lingkungan.

Inti dari semua pertemuan tingkat dunia yang membahas persoalan lingkungan tadi apabila disimpulkan ternyata memberikan pemahaman bahwa pokok persoalan lingkungan berawal dari persoalan-persoalan kebijakan atau regulasi-regulasi yang dibuat. Banyak kebijakan pembangunan selama ini tanpa disadari sangat merugikan lingkungan. Berangkat dari hal tersebutlah kemudian masyarakat dunia mulai melahirkan konsep pembangunan berkelanjutan yang orientasinya ingin memihak kepada lingkungan. Namun meski Agenda 21 dengan konsep pembangunan berkelanjutan itu telah diintrodusir lebih dari 14 tahun silam kenyataannya masih belum memberikan hasil yang menggembirakan. Faktor kebijakan dan regulasi yang dibuat penentu kebijakan lagi-lagi disinyalir menjadi pokok penyebabnya.

Indro Sugianto, Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), dalam Evaluasi Akhir Tahun Bidang Lingkungan tahun 2005 menyebutkan bahwa pengarusutamaan isu pembangunan berkelanjutan dalam pengambilan kebijakan dinilai semakin kabur (Kompas, 2005). Hal tersebut terlihat dari ketidakkonsistenan pemerintah dalam menjalankan kebijakan. Padahal menurut Indro, sebelumnya terlihat jelas para *stakeholders* dalam hal ini pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan akademisi memperlihatkan langkah yang sama untuk mengarusutamakan isu pembangunan berkelanjutan. Kejadian tersebut menjelaskan betapa sampai saat ini aspek kebijakan dan regulasi yang dibuat masih sering berseberangan dengan tuntutan pembangunan berkelanjutan.

Kesepakatan nasional untuk lebih serius menerapkan konsep Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia tercetus pada Konferensi Nasional Pembangunan Berkelanjutan pada bulan Januari 2004 di Yogyakarta (Hardjasoemantri, 2005). Salah satu kesepakatan yang dicapai dan diterima dalam konferensi tersebut adalah mengembangkan

dan memanfaatkan komunikasi dan informasi. Dalam konteks pengelolaan lingkungan tentunya mengembangkan dan memanfaatkan komunikasi dan informasi tidak hanya dipahami sebagai upaya penyediaan informasi dan upaya memberikan informasi lingkungan secara linier satu arah, dari atas ke bawah (*top down*) atau sebaliknya (*bottom up*), tapi bagaimana pertukaran arus informasi terjadi secara interaktif (*dialogis*).

Meskipun sebagai suatu konsep, komunikasi lingkungan itu sendiri masih sangat jarang diangkat ke permukaan untuk di wacanakan, setidaknya komunikasi lingkungan telah hadir tanpa disadari. Ambil contoh pemberitaan yang dibuat Kompas di atas sebetulnya adalah suatu aktifitas komunikasi media yang dikoordinir oleh sekelompok orang dan secara langsung memberikan pengetahuan kepada kita bahwa pembangunan berkelanjutan masih belum terwujud secara nyata. Apa yang diberitakan Kompas tadi, setidaknya menjadi bahan masukan dalam rangka evaluasi kebijakan. Hal ini juga menjelaskan bahwa kepedulian *stakeholders* dalam hal ini pers sangat dibutuhkan. Bahkan tidak hanya pers, lebih utama lagi seluruh masyarakat yang peduli dengan lingkungan. Pers sesuai dengan fungsinya mungkin memiliki karakteristiknya sendiri ketika menjalankan perannya. Pada konteks ini lebih tepat sebagai fungsi kontrol dan fungsi informasi, sekaligus sarana untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan (*policy demands*) bagi masyarakat umum ataupun kelompok masyarakat, dalam rangka kesertaannya menjalankan peran pengelolaan lingkungan.

Sebagaimana pers, masyarakat dalam segala manifestasinya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), para cerdas pandai, maupun masyarakat umumnya, dapat menyampaikan gagasannya sebagai wujud peran sertanya dalam pengelolaan lingkungan. Apa yang ingin disampaikan dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, secara langsung ataupun tak langsung. Langsung dipahami sebagai adanya pertemuan tatap muka, sementara itu tidak langsung dipahami sebagai bermedia, artinya lewat saluran media. Entah itu media massa maupun tidak. Terpenting, pesan yang disampaikan dapat dijadikan *in put* bagi

pengambil kebijakan publik, dalam hal ini kebijakan pengelolaan lingkungan. Berkenaan dengan tuntutan terhadap kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada lingkungan, maka *pressure* masyarakat harus ada, dalam hal ini media massa dapat dijadikan sarana (Purnaweni, 2004).

Peran pers atau media massa, yang dalam hal ini sebagai bagian dari *Civil Society* tentunya sangat penting dalam kerangka pengelolaan lingkungan. Substansi dari hal ini telah sangat jelas diatur di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers maupun Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keterkaitan antara media massa dan kebijakan pengelolaan lingkungan, dapat pula ditinjau dari konsep *good governance*, karena pada hakekatnya, prinsip *good governance* mempersyaratkan adanya partisipasi dan transparansi, yang menjadi kunci penting dalam keterlibatan *stakeholders* terutama berkaitan urusan pemerintahan, utamanya yang menyangkut *public Policy*.

United Nations Development Program (UNDP) dalam Tangkilisan (2004), menyebutkan beberapa karakteristik *good governance* sebagai berikut ; *Participation, Rule of Law, Transparency, Responsiveness, Consensus orientation, Equity, Effetiveness and efficiency, Accountability*. Kemudian, *Indonesian Centre for Environmental Law* (ICEL) dalam Hadi (2001), mempersyaratkan lima hal yang harus ada agar konsep *Good Governance* berjalan, antara lain; lembaga perwakilan yang mampu menjalankan fungsi kontrol dan penyalur aspirasi masyarakat, pengadilan yang mandiri, bersih dan professional, birokrasi yang responsif dan berintegritas, masyarakat sipil yang kuat sebagai fungsi kontrol, serta desentralisasi dan lembaga perwakilan yang kuat.

Sementara itu dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, konsep *Good Governance* dalam pengelolaan lingkungan hidup yang lebih dikenal dengan *Good Environmental Governance* (GEG) setidaknya mengedepankan 10 hal antara lain; Visi

strategis, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, partisipasi, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme (Santosa, 2006). Kesepuluh prinsip tersebut saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri yang harus menjadi karakteristik pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah sesuai semangat Undang-undang Nomor 32 tahun 2004. Berikut gambar hubungan *Good Environmental Governance* (GEG) dengan pengelolaan lingkungan hidup :

Tabel 1.1.1. Hubungan Antara *Good Environmental Governance* (GEG) dengan pengelolaan lingkungan hidup

Good Environmental Governance (GEG)	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP						
	UU No.23 Th 1997 ttg PLH & UU No.32 Th 2004 ttg Pemda						
	Penataan Ruang	Pemanfaatan	Pengembangan	Pemeliharaan	Pemulihan	Pengawasan	Pengendalian Lingkungan
<i>Visi-Strategic</i>	Pembangunan Berkelanjutan						
<i>Law Enforcement</i>	Sanksi Administratif dan Pidana						
<i>Transparency</i>	Keterbukaan Informasi						
<i>Equality</i>	Pemanfaatan, Perlindungan/Pemeliharaan SDA& LH						
<i>Responsiveness</i>	Preemtif, Preventif, Represif, Kuratif, Rehabilitatif						
<i>Participation</i>	Mitra dan Kemitraan Sesama Stakeholders						
<i>Accountability</i>	Finansial, Moral/Etik, Normatif dan Politik						
<i>Control/check</i>	Monitor dan Evaluasi/Pengawasan (Riset dan Pengembangan)						
<i>Efficiency-effectiveness</i>	Mangkus dan Sangkil (Daya Guna dan Hasil Guna)						
<i>Professional</i>	Peran Genuine(ahli) Pelaku Pemangku Kepentingan						

Sumber : Santosa (2006)

Sayangnya kenyataan di lapangan menunjukkan *stakeholders* belumlah optimal dalam menjalankan perannya sesuai tuntutan di atas, namun dapat dipahami apa yang dipersyaratkan ICEL tersebut hingga saat ini kondisinya memang belum memungkinkan. Hadi, (2002) mensinyalir belum adanya sinergi yang baik antara pihak yang berkepentingan. Ia menyebutkan tidak ada sinergi diantara masyarakat sipil dalam mengontrol kebijakan pembangunan, semuanya berjalan sendiri-sendiri dan terkesan parsial. Padahal apabila tindakan mereka terorganisir bukan tidak mungkin masyarakat sipil dapat menjadi kelompok penekan untuk mengedepankan isu-isu lingkungan. Pemanfaatan media

massa sebagai saluran dalam menyampaikan aspirasi tadi merupakan salah satu cara untuk membentuk opini publik sehingga dapat direspon oleh Pengambil Kebijakan.

Pemanfaatan media massa sebagai sarana mengkampanyekan sekaligus penyebaran informasi lingkungan telah sering dilakukan. Lacey dan Longman serta Parlour dan Schatzow dalam Hannigan (1995), menyebutkan pada periode akhir 1960-an sampai awal 1970-an ulasan media terhadap lingkungan meningkat secara dramatis, untuk pertama kalinya isu lingkungan dipandang oleh para jurnalis Inggris dan Amerika sebagai kategori berita utama.

Di Propinsi Bangka Belitung sejak kehadiran pers, isu-isu dan persoalan lingkungan pun tak luput dari perhatian media. Persoalan lingkungan khas daerah sudah menjadi bagian dari pemberitaan surat kabar lokal. Namun demikian belum diketahui secara pasti seperti apa karakteristik pemberitaan yang disajikan oleh surat kabar lokal tersebut dan bagaimana pula pengambil kebijakan menyikapi persoalan-persoalan lingkungan yang ditulis oleh surat kabar tersebut.

Dalam perspektif komunikasi, pertautan media dalam ranah kebijakan publik dapat dilihat menggunakan pendekatan analisis isi media. Melalui analisis isi media, akan dapat dipahami seperti apa sebetulnya pers memandang isu dan permasalahan lingkungan dan bagaimana pula pers menjalankan fungsi-fungsinya, terlebih dalam konteks kebijakan pengelolaan lingkungan.

Beberapa penelitian pernah dilakukan berkenaan dengan pemanfaatan media massa, khususnya surat kabar dalam menginformasikan isu lingkungan. Salah satunya apa yang dilakukan oleh Sekretariat Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia (SKEPHI) dalam studi analisis isinya pada tahun 1995. Hasil studi tersebut menjelaskan bahwa hampir semua surat kabar besar lokal dan nasional menyediakan ruang untuk berbagai pemberitaan lingkungan. Dua surat kabar yang menjadi

media penyebar utama isu-isu lingkungan adalah Kompas dan Media Indonesia.

Studi analisis isi lainnya pernah dilakukan oleh Nuryadi (2003). Dalam studinya tersebut, Nuryadi lebih melihat pada karakteristik tiga surat kabar ibukota yakni, Kompas, Koran Tempo, dan Sinar Harapan dalam menyajikan informasi lingkungan hidup.

Sampai saat ini belum ada penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara pasti bagaimana pemberitaan lingkungan yang dilakukan media massa khususnya surat kabar implikasinya terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi peneliti untuk melakukan suatu studi analisis isi mengenai pemberitaan lingkungan yang dilakukan surat kabar lokal di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung kemudian implikasinya terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan khususnya di Kabupaten Bangka.

1.2. Identifikasi Masalah

Meskipun dalam perspektif komunikasi, lingkungan sering menjadi isu dan masalah kebijakan pembangunan yang sensitif, namun hingga kini masih jarang dilakukan kajian yang khusus menelaah tentang implikasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dari sudut pandang komunikasi khususnya melalui analisis isi berita.

Secara konseptual aspek komunikasi dan aspek kebijakan memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Dalam tataran empiris hubungan tersebut tercermin pada persepsi seseorang dalam merespon isu dan permasalahan lingkungan hidup. Dalam hal ini media massa sebagai salah satu institusi sosial memiliki kontribusi yang besar terhadap persepsi seseorang.

Sebagai salah satu alat yang digunakan pada aktifitas komunikasi, media memiliki peran sangat penting untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Hubungan media dengan *Good Environmental*

Governance menjadi penting mengingat proses pengambilan suatu kebijakan tidak mungkin dilakukan tanpa partisipasi *stakeholders*, dalam hal ini media menjadi wahana untuk menciptakan ruang interaksi pada proses pengambilan kebijakan tadi (Suranto dkk, 2005). Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup peran media dapat dilakukan dengan cara mempromosikan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan, memonitor dan mengawasi (kontrol) terhadap kebijakan, dan terpenting menyuarakan tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*) berkenaan dengan pengelolaan lingkungan.

Di Bangka Belitung persoalan kerusakan lingkungan masih sering terjadi, padahal pemberitaan tentang hal tersebut telah sering dilakukan oleh surat kabar lokal. Beberapa persoalan ditengarai menjadi penyebab misalnya :

- Media massa sebagai salah satu alat yang digunakan dalam aktifitas komunikasi khususnya untuk menyampaikan informasi lingkungan masih memiliki keterbatasan, sehingga masih belum optimal menjalankan fungsinya dalam kerangka pengelolaan lingkungan.
- Kebijakan pembangunan dan regulasi yang dilahirkan tanpa disadari sangat merugikan lingkungan, hal ini sebagai akibat dari belum adanya keterpaduan dalam membuat kebijakan. Kelemahan ini terindikasi pada berbagai aspek seperti, kelembagaan lingkungan, sumberdaya manusia, penegakan hukum lingkungan dan sederet persoalan lainnya.
- Belum berjalannya konsep pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang dicita-citakan juga adalah salah satu sebab. Konsep-konsep kemitraan, partisipasi, peran serta, pemberdayaan dalam pengelolaan lingkungan belum optimal dilaksanakan. Hal ini terlihat dari masih lemahnya peran *stakeholders* untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan.

Dari beberapa hal tadi maka komunikasi lingkungan menjadi penting. Peran surat kabar dalam rangka pengambilan suatu kebijakan publik tentunya tak dapat dikesampingkan. Studi ini hendak melihat interelasi antara komunikasi lingkungan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan. Jadi fokus kajiannya adalah analisis pemberitaan lingkungan hidup di surat kabar.

1.3. Perumusan Masalah

Peranan media massa dalam menyebarkan informasi yang diperlukan masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dalam pasal 6 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui (*Public's right to know*) dan lembaga pers berperan memenuhinya. Tidak hanya itu, hak masyarakat untuk memperoleh informasi dijamin pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia (HAM), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (1) "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya".

Sementara itu mengenai hak masyarakat akan informasi lingkungan secara spesifik dinyatakan dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan yang berbunyi "Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan." Selain itu pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan tersebut menyatakan "Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan yang baik dan sehat".

Berdasarkan kenyataan di atas, analisis isi surat kabar mengenai pemberitaan lingkungan dan implikasinya terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bangka menjadi sangat penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana pers melakukan perannya, kemudian

bagaimana pula pengambil kebijakan di daerah merespon pemberitaan-pemberitaan tersebut dalam kebijakan publik berkenaan dengan pengelolaan lingkungan.

Penelitian ini akan mengamati aspek pemberitaan lingkungan serta aspek kebijakan pengelolaan lingkungan. Peneliti tidak bermaksud menguji kedua aspek tersebut. Penelitian ini pada satu sisi hanya melakukan analisis isi terhadap pemberitaan lingkungan yang ada di surat kabar, kemudian untuk melihat implikasinya peneliti mewawancarai pengambil kebijakan dan LSM serta redaktur surat kabar untuk mengetahui persepsi mereka tentang pemberitaan lingkungan dan kebijakan pengelolaan lingkungan tersebut. Berangkat dari uraian di atas maka permasalahan yang ingin diketahui jawabannya, yaitu : "Bagaimana sesungguhnya pemberitaan lingkungan disajikan oleh surat kabar lokal dalam hal ini harian pagi Bangka Pos, Bangka Belitung Pos, dan Rakyat Pos dan bagaimana pula implikasinya terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bangka? ". Adapun pertanyaan penelitiannya adalah :

1. Bagaimana isi pemberitaan surat kabar Bangka Pos, Bangka Belitung Pos, dan Rakyat Pos tentang lingkungan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ?
2. Bagaimana intensitas dan kualitas pemberitaan lingkungan pada surat kabar Bangka Pos, Bangka Belitung Pos, dan Rakyat Pos di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung?
3. Bagaimana implikasi pemberitaan lingkungan terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bangka ?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan profil isi pemberitaan lingkungan pada surat kabar Bangka Pos, Bangka Belitung Pos, dan Rakyat Pos di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Mendeskripsikan intensitas dan kualitas pemberitaan pada surat kabar Bangka Pos, Bangka Belitung Pos, dan Rakyat Pos tentang lingkungan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Mendeskripsikan implikasi berita terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bangka.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat terhadap dunia akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan yang berkenaan dengan konsep komunikasi lingkungan, khususnya yang berkenaan dengan pemberitaan surat kabar tentang lingkungan implikasinya terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan.

1.5.2. Manfaat terhadap dunia praktis

Keterangan-keterangan yang didapatkan dari hasil penelitian ini setidaknya diharapkan dapat memberikan sedikit sumbangan terhadap upaya perencanaan, perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bangka.

1.6. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang analisis isi media sejauh ini telah banyak dilakukan, termasuk topik-topik lingkungan, namun tulisan mengenai analisis isi media dalam hal pemberitaan surat kabar tentang lingkungan implikasinya terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan belum pernah dilakukan. Terlebih yang terfokus pada surat kabar lokal di Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh sebab itu dapat dikatakan tulisan ini bersifat orisinal. Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan analisis isi media antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Nuryadi (2003), mengenai analisis isi informasi lingkungan hidup di beberapa surat kabar, antara lain Kompas, Koran Tempo, dan Sinar Harapan. Penelitian tersebut tujuannya hendak mengkaji karakteristik surat kabar dalam menampilkan informasi lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga surat kabar tadi berupaya menyajikan berita lingkungan hidup secara berimbang, akurat, jelas dan obyektif.

Selain itu penelitian tentang surat kabar menggunakan analisis isi pernah pula dilakukan oleh Litbang Kompas bersama Zentra Media, Undip (2003). Penelitian tersebut ingin melihat obyektivitas media, dalam hal ini Kompas, Republika, Media Indonesia, dan Koran Tempo menyajikan konflik di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam. Penelitian dilakukan selama tiga tahap periode Mei s/d September 2003. Hasil penelitian menunjukkan ada kesamaan pola antara keempat surat kabar dalam menyajikan berita-berita konflik Aceh, tapi tidak dalam hal yang berkenaan dengan prinsip jurnalisme damai (netralitas pers).

Penelitian analisis isi yang dilakukan oleh Henry Subiakto (2000), juga berkenaan dengan obyektivitas pemberitaan pers nasional. Subiakto mengambil 8 surat kabar lokal maupun nasional sebagai obyek studinya, antara lain; Kompas, Media Indonesia, Suara Pembaharuan, Surya, Jawa Pos, Suara Merdeka, Pikiran Rakyat, dan Republika. Periode pemberitaan yang diteliti adalah Januari s/d April 2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Suara Pembaharuan, Kompas, Suara Merdeka, dan Media Indonesia cenderung obyektif dibanding dengan surat kabar lain dalam hal keakurasian pemberitaan, validitas nara sumber, dan ketidakberpihakan pada pihak manapun.

Beberapa penelitian ini memberikan inspirasi kepada penulis untuk melakukan penelitian analisis isi tentang pemberitaan lingkungan implikasinya terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan. Subyektivitas tak terhindarkan dalam pemilihan obyek serta lokasi penelitian. Harapan penulis orisinalitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.